

**KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH PEMERINTAH DESA BALAK,
KECAMATAN SONGGON, KABUPATEN BANYUWANGI DALAM
MEWUJUDKAN PROGRAM BANYUWANGI HIJAU**

***WASTE MANAGEMENT POLICY OF THE GOVERNMENT OF BALAK
VILLAGE, SONGGON DISTRICT, BANYUWANGI REGENCY IN
REALIZING THE GREEN BANYUWANGI PROGRAM***

Tegar Abimanyu Bimantara¹⁾, Edhi Siswanto²⁾

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jember

¹abimanyubimantara7@gmail.com

ABSTRAK

Jumlah sampah yang semakin menggunggung dan sulit diatasi, menjadi masalah yang serius bagi kelangsungan lingkungan dan kehidupan manusia. Keterlambatan penanganan sampah akan mengakibatkan perubahan iklim yang semakin cepat, yang tentu akan mengancam kehidupan masyarakat. Program Banyuwangi Hijau merupakan program inovasi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, program kepanjangan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi, dilaksanakan melalui bantuan Pemerintah Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes). Program ini dimungkinkan untuk menahan kebocoran sampah pada pencemaran lingkungan, melalui pemilahan sampah oleh masyarakat sebagai anggota program. Penelitian ini menjelaskan bagaimana implementasi program Banyuwangi Hijau di Desa Balak. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, masyarakat Desa Balak terbantu dengan program ini untuk mendistribusikan sampah rumah tangga mereka kepada tempat pengelolaan sampah terpadu. Sampah dipungut dua kali dalam seminggu, dan membayar iuran setiap bulannya. Keterlambatan pemungutan menjadi kendala program, dan masih belum seluruh warga Desa Balak menjadi anggota dalam program tersebut.

Kata kunci: kebijakan pengelolaan sampah, sampah terpadu, kelestarian lingkungan

ABSTRACT

The amount of waste that is increasingly mounting and difficult to overcome, is a serious problem for the sustainability of the environment and human life. Delay in handling waste will result in accelerated climate change, which will certainly threaten people's lives. The Banyuwangi Green Program is an innovation program of the Banyuwangi Regency Government, a program that stands for the Banyuwangi Regency Environmental Agency, implemented through Village Government assistance as outlined in the Village Regulation (Perdes). This program is possible to restrain the leakage of waste to environmental pollution, through waste sorting by the community as members of the program. This research will explain how the implementation of Banyuwangi Hijau program in Balak Village. Using a qualitative research method with a descriptive approach, data collection was carried out by observation and interviews. The results showed that the Balak Village community was helped by this program to distribute their household waste to the integrated waste management site. Waste is collected twice a week, and dues are paid monthly. Delays in collection are an obstacle to the program, and still not all Balak villagers are members of the program.

Keywords: waste management policy, integrated waste, environmental sustainability

PENDAHULUAN

KLHK di Tahun 2022 menyebutkan; terdapat sebanyak 21,1 Juta ton sampah nasional, yang merupakan hasil timbunan sampah dari seluruh kabupaten dan kota di Indonesia. Sehingga dapat diketahui bahwa sebanyak 34,29% atau 7,2 Juta ton sampah, masih diluar kendali pengelolaan (Adhiyasa, 2023). Hal ini akan menjadi bahan perbincangan cara untuk mengendalikan dan mengelola sampah yang semakin tahun pasti meningkat karena manusia memiliki kepribadian yang semakin konsumtif. Sampah yang diluar kendali pengelolaan tersebut, akan tersebar pada titik-titik timbunan ilegal, disambung dengan sungai, dan berakhir di lautan. Siklus ini merupakan pilihan masyarakat awam untuk membuang sampah-sampah mereka, fenomena ini merupakan kegagalan Pemerintah Daerah dalam memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan persampahan di level lokal.

Pengelolaan sampah di Indonesia / di tingkat nasional, telah diatur dalam tiga jenis regulasi. Ketiga regulasi tentang pengelolaan sampah yang diatur dalam undang - undang, peraturan pemerintah dan peraturan presiden, menegaskan bahwa penanganan sampah menjadi fokus dan prioritas tinggi bagi pemerintah. Sehingga dengan demikian, pemerintah daerah dapat merespon fenomena dan aturan di atasnya, untuk juga dapat peduli dan mempersiapkan pengelolaan sampah yang mumpuni di level daerah.

Kebijakan lingkungan yang dalam hal ini adalah pengelolaan sampah, telah diatur di semua lini pemerintahan termasuk pemerintah pusat, daerah provinsi, daerah kabupaten/kota. Kabupaten Banyuwangi saat ini memiliki program inovasi Banyuwangi hijau, untuk menangani masalah darurat sampah di wilayah Banyuwangi. Melalui program Banyuwangi hijau, masyarakat dapat lebih menyadari pentingnya menjaga lingkungan dengan pengelola sampah.

Program Banyuwangi hijau sangat berkontribusi besar dalam menekan sampah rumah tangga yang tidak terkelola, sehingga tidak membebani timbunan sampah di TPA. Uniknya, program Banyuwangi hijau dijalankan secara mandiri melalui badan usaha milik desa (BUMDes) sebagai bahan pemberi layanan persampahan. Layanan tersebut telah diatur melalui peraturan desa yang telah disusun dan disepakati oleh seluruh unsur desa yang akan terlibat, dengan didampingi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi. Pemerintah Desa Balak merupakan anggota terdaftar dari program Banyuwangi hijau, yang lokasinya sangat dekat dengan TPS 3R Balak. Peneliti akan

melakukan tinjauan terhadap implementasi kebijakan program pelayanan persampahan di Desa Balak, Kecamatan Songgon.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penyajian data dalam penelitian ini disusun secara sistematis, akurat dan faktual, yang artinya seluruh data yang didapat merupakan kondisi terkini berdasarkan fakta-fakta yang bersifat kongkrit dan alami. Karakteristik metode penelitian deskriptif kualitatif tersebut, sangat cocok digunakan pada topik permasalahan yang hendak diteliti, yakni; Kebijakan Pengelolaan Sampah Pemerintah Desa Balak, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peneliti melakukan peninjauan Implementasi program layanan persampahan Banyuwangi Hijau dengan melakukan kegiatan observasi lapangan dan wawancara bersama para informan. Peneliti melakukan kunjungan ke Kantor Pemerintah Desa Balak, untuk melakukan studi Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2023, Tentang Layanan Sampah. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan wawancara bersama perangkat/unsur pemerintahan, yakni dalam hal ini adalah Sekretaris Desa Balak. Peneliti juga melakukan kegiatan observasi lapangan dan wawancara kepada informan, yang dalam hal ini adalah masyarakat Desa Balak sebagai pelanggan dari program layanan persampahan. Untuk memastikan kesesuaian yang sesungguhnya antara isi dan konteks kebijakan kepada implementasi kebijakan. Adapun hasil observasi dan wawancara sebagai berikut;

1. Sosialisasi Program Persampahan Kepada Masyarakat

Hasil wawancara bersama informan, menunjukkan bahwa sosialisasi kepada masyarakat telah diberikan, sebelum program pelayanan persampahan ditawarkan kepada masyarakat. Sosialisasi yang telah diberikan, berhasil mengedukasi masyarakat dan mendapatkan respon masyarakat yang positif.

2. Pelatihan Tentang Persampahan Kepada Masyarakat

Hasil wawancara bersama informan, menunjukkan bahwa pelatihan telah diberikan. Pelatihan untuk mengenal jenis-jenis sampah dan pemilahan sampah berdasarkan jenisnya, dapat membantu proses pengelolaan sampah lebih cepat, aman, dan murah melalui tempat pengelolaan sampah terpadu (TPS 3R Balak Songgon).

3. Fasilitas Program Persampahan

Hasil wawancara bersama informan diatas menunjukkan bahwa; Masyarakat desa yang terdaftar sebagai peserta program layanan persampahan, akan mendapatkan 2 tong sampah berwarna kuning dan hijau. Dimana tong sampah berwarna kuning diperuntukkan untuk sampah anorganik, sedangkan tong sampah berwarna hijau diperuntukkan untuk sampah organik. Adapun layanan jasa yang diberikan adalah pengambilan sampah rutin rumah ke rumah (*door to door*), dengan frekuensi pengambilan dua kali dalam satu minggu.

4. Keluhan Selama Mengikuti Program

Hasil wawancara dengan informan diatas, menunjukkan bahwa terdapat keluhan dari masyarakat pengguna layanan program persampahan, yang mencakup; Telatnya pengambilan sampah di rumah-rumah warga, karena kurangnya petugas pengambil sampah. Telatnya pengambilan sampah tersebut, akan berdampak bau tak sedap dari sampah organik yang terlalu lama tertimbun. Kurangnya petugas juga mengakibatkan lambatnya pengambilan dan rasa hibah dari masyarakat.

5. Pendampingan Selama Mengikuti Program

Hasil wawancara dengan informan diatas menunjukkan bahwa, belum dijumpai adanya pendampingan oleh petugas pengelola layanan sampah selama program berjalan. Sehingga wajar apabila keluhan dari masyarakat pengguna layanan masih belum tersalurkan kepada petugas pengelola.

6. Besaran Biaya Tagihan Program

Hasil kegiatan wawancara bersama informan diatas menunjukkan bahwa, tagihan masyarakat sebagai pelanggan program layanan sampah di lingkungan Desa Balak adalah Rp 10.000. Harga tersebut merupakan harga khusus dan murah, karena Desa Balak berada di ring satu yang artinya dekat dengan lokasi TPS 3R. Masyarakat juga menambahkan, jika suatu saat tarif naik tidak akan menjadi masalah, yang terpenting adalah layanan yang diberikan dapat lebih baik.

7. Aspirasi Masyarakat Untuk Program Layanan Sampah

Hasil wawancara bersama informan diatas menunjukkan bahwa; masyarakat Desa Balak menginginkan jumlah pegawai/petugas pemungut sampah itu ditambah, agar petugas tidak kewalahan, tepat waktu dalam pengambilan sampah, dan jika dimungkinkan menambah jadwal pengambilan menjadi 3 kali dalam satu minggu, agar sampah yang tertimbun di tong tidak bau. Masyarakat juga menambahkan, untuk menyasar masyarakat di sekitaran sungai lebih dahulu, karena mereka lebih sering membuang sampah di sungai.

Artinya dari sini, masyarakat Desa Balak berekspektasi/berharap tinggi dari program layanan sampah, agar hunian lingkungan mereka menjadi lebih bersih dan sehat.

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas, yang mendeskripsikan temuan lapangan dan hasil kegiatan wawancara bersama para informan. Peneliti akan mengukur temuan tersebut dengan menggunakan teori implementasi kebijakan dari Mirelee S. Grindle.

No	Indikator	Temuan di Lapangan	Keterangan
1	Isi Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> a. Program layanan sampah yang diatur melalui kebijakan di level desa ini, berhasil berkontribusi untuk mengurangi timbulan sampah masyarakat Desa Balak. b. Program layanan sampah yang berorientasi pada nol timbulan sampah di Desa Balak, juga perlahan-lahan mampu merubah perilaku masyarakat desa untuk membuang dan memilah sampah di tong sampah yang berbeda. c. Kebijakan PERDES layanan sampah di susun oleh Pemerintah Desa, dengan BPD Balak, dan dibantu oleh Dinas Lingkungan Hidup sebagai aktor yang menggagas. d. Pelaksana program adalah Pemerintah Desa Balak, melalui BUMDes pada urusan administrasi, dan TPS 3R balak sebagai pengelola sampah. e. Aktivitas pengelolaan sampah yang terintegrasi ini, menghasilkan lingkungan yang bersih, perubahan perilaku masyarakat yang positif terhadap lingkungan, dan hasil keuntungan dari proses pengolahan sampah yang tepat. 	<p>Ditinjau melalui teori implementasi kebijakan dari Mirelee S. Grindle. Pada isi kebijakan, yang memiliki 5 ukuran yang mencakup; manfaat yang dihasilkan; Perubahan yang diinginkan; posisi pembuat kebijakan; pelaksana program; dan sumber daya yang dihasilkan, telah sesuai dengan temuan hasil penelitian.</p>
2	Konteks Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> a. Kebijakan ini secara langsung dan tidak langsung, dipengaruhi oleh beberapa kekuasaan dan kepentingan; Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi; Kerajaan Norwegia; Pemerintah Desa Balak. Termasuk kepentingan dari NGO asing yang berorientasi kepada pelestarian lingkungan. Para kekuasaan dan kepentingan diatas berperan sebagai aktor, yang menghasilkan strategi pengelolaan sampah yang dimuat dan diatur melalui kebijakan di level desa. b. Karakteristik lembaga/aktor yang terlibat dalam mereka yang bekerja di sektor pemerintahan/pelayanan publik, dan bersifat non-profit. c. Proses yang panjang dan sistematis, sampai dengan menghasilkan dampak yang signifikan terhadap lingkungan 	<p>Ditinjau melalui teori implementasi kebijakan dari Mirelee S. Grindle. Pada konteks kebijakan, yang memiliki 3 ukuran yang mencakup; kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor; Karakter lembaga & penguasa; serta kepatuhan dan daya tanggap. telah sesuai dengan temuan hasil penelitian.</p>

dalam kurang dari setahun, menunjukkan bahwa komitmen para aktor yang terlibat dalam setiap tugas, patuh terhadap aturan dan memiliki daya tanggap yang tinggi.

Sumber: Olahan Data Peneliti, 2024.

KESIMPULAN

Program Banyuwangi Hijau yang diimplementasikan di Desa Balak, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi, mendapatkan sambutan yang baik di masyarakat Desa Balak di setiap dusun. Posisi desa yang berlokasi dekat dengan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu 3R Balak (Ring 1), membuat biaya layanan persampahan sangat murah dan terjangkau. Teknis pelaksanaan layanan juga telah diatur melalui Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2023, Tentang Pengelolaan Sampah. Implementasi program Banyuwangi Hijau di lingkungan Pemerintah Desa Balak juga sesuai dengan pedoman dalam peraturan desa tersebut. Namun dalam praktik berjalan, masyarakat yang terdaftar sebagai pelanggan pelayanan persampahan, menyampaikan keluhan akibat telatnya pengambilan sampah yang dijadwalkan 2 kali dalam seminggu, sehingga sampah menjadi sangat berbau. Masyarakat pelanggan juga menganggap jumlah armada, dan petugas pengambil sampah yang dilakukan secara *dor to dor* sangat kurang dan kewalahan. Adapun masyarakat yang ingin mendaftarkan diri sebagai pelanggan/berlangganan, harus menunggu lama dan tidak bisa menerima pelayanan dihari yang sama karena alasan *database*.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhiyasa, Berllan. (2023). Timbunan Sampah Nasional Dari 202 Kabupaten/Kota Se-Indonesia Capai 21,1 Juta Ton. <https://www.viva.co.id/gaya-hidup/kesehatan-intim/1657978-timbunan-sampah-nasional-dari-202-kabupaten-kota-se-indonesia-capai-21-1-juta-ton>. Diakses Pada Tanggal 22 Desember 2023.
- Grindle, M. S. (1980). *Politic and Policy Implementation In the Third World*. New Jersey: Princeton University Press.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2022, Tentang Pengelolaan Sampah Regional. Jawa Timur.
- Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2022, Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013, Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Banyuwangi.